

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam suatu wilayah. APBD mencakup sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. APBD merupakan hal penting dalam manajemen keuangan daerah, dan penyusunannya dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah. Dalam rancangan keuangan pemerintah daerah perlu disetujui bersama oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi dan pembangunan di tingkat Lokal. Dalam mengurus anggaran daerah, Pemerintah Daerah dibantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membuat serta merealisasikan anggaran yang sudah di bentuk.
2. Proses penyusunan anggaran di kota Madiun telah terstruktur dengan jelas serta sudah menggunakan sistim untuk menyusun penganggarannya, dan menentukan kegiatan menetapkan APBD sesuai dengan hasil Musrebang dari masyarakat hingga ke pihak Legislatif, dengan itu anggaran di pemerintahan menggunakan pendekatan Bottom Up dan Top Down dengan dasar dari Kemendagri.

1.2 Keterbatasan

Dalam pelaksanaan penelitian, terdapat keterbatasan penelitian yaitu penelitian ini terbatas pada proses wawancara. Dimana wawancara terkendala pada waktu narasumber dikarenakan ada kesibukan lain, serta kurangnya pemahaman narasumber untuk proses penganggaran yang terjadi di kota, selain itu keterbatasan pada penelitian ini tidak tersediannya siklus maupun dokumen di kecamatan tentang penganggaran yang terjadi dikota.

1.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian maka saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan wawancara kepada pihak BPKAD di Kota Madiun, serta memperoleh dokumentasi tidak hanya dari kantor kecamatan Taman, melainkan juga dari BKAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Nurdin, D., & Yusnita, N. (2017). Analisis Proses Perencanaan Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali). *Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 12*, , Hlm 86-98.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (2023). Apa Pengertian, Tujuan, Serta Fungsi APBN dan APBD. Didapatkan dari <https://bpkad.asahankab.go.id/detailpost/apa-pengertian-tujuan-serta-fungsi-apbn-dan-apbd>
- Efrina S, L. (2022). Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Riset Akuntansi Jambi Vol 5 No 1*.
- Kecamatan Taman Kota Madiun (2024). Rancangan Akhir Rencana Kerja. didapat dari kecamatan-taman.madiunkota.go.id
- Kecamatan Taman Kota Madiun (2024). Rencana Strategi Perubahan Kedua Kecamatan Taman Tahun 2019-2024. didapat dari kecamatan-taman.madiunkota.go.id
- Mardiasmo. (2011). *Siklus Anggaran Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Natsir, M, 2004, Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nirwana, N. Q., & Nurasik. (2020). *Perencanaan dan Penganggaran Bisnis*.
- Paputungan , A., Ilat, V., & Morasa, J. (2017). Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow) . *E-Journal UNSRAT*.
- Pemerintah Kota Madiun (2022). Visi Misi Kota Madiun. Didapatkan dari https://madiunkota.go.id/menu/visi_misi
- Peraturan Wali Kota Pasal 9 dalam Pasal 8 ayat (1) mengenai Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud. Didapatkan dari <https://kominfo.madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Perwal-No-32-tahun-2018.pdf>
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan”. Didapat dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/213964/perwali-kota-madiun-no-82-tahun-2020>
- Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (2023). Evaluasi Kinerja Realisasi Anggaran, Biro Administrasi Pembangunan Adakan Desk Pelaksanaan APBD/APBN Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Didapatkan dari <https://ro-admpembangunan.jatimprov.go.id/index.php/post/evaluasi-kinerja-realisisi-anggaran-biro-administrasi-pembangunan-adakan-desk-pelaksanaan-apbd-apbn-pemerintah-kabupaten-kota-se-jawa-timur>
- Siregar, R., & Abdullah, A. (2017). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Vol 7 No 2*.

- Sugiyono, D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D/Sugiyono*. Bandung: Alfabeta, 15.
- Suhardi. (2019). *Budgeting Perusahaan, Koperasi, dan Simulasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Undang-undang No 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang “fungsi APBN dan APBD memiliki fungsi yaitu, otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi”. Didapat dari <https://www.pajakku.com/read/6396a34fb577d80e806f882a/Mengenal-APBN-dan-APBD->
- Yosiko, R. (2023). Proses Penganggaran Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Adhikari. Vol 2 No 4*.